

EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN PENDEKATAN STAKEHOLDER ANALYSIS PADA KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS BERBASIS PARIWISATA SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Dhita Eka Pramita Hesti^{1*}, Harry Irawan Johari², Joni Safaat Adiansyah³, Sukuryadi⁴

^{1,2,3}Pascasarjana, Ilmu Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Mataram

dhita.hesti80@gmail.com^{1*}, harryijohari@gmail.com², joni.adiansyah@ummat.ac.id³,
sukuryadi@ummat.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Pasca penetapan Sembalun sebagai kawasan perdesaan prioritas berbasis pariwisata melalui Keputusan Bupati Lombok Timur No.100.3.3.2/310/PD/2024 pada tanggal 5 September 2024, sebagai desa tematik dalam RPJMN 2025–2029, kawasan ini mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan lonjakan produksi sampah, menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sampah di kawasan Sembalun dengan menggunakan pendekatan *Stakeholder Analysis* untuk memahami peran, kepentingan, serta hubungan antar pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, dokumentasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas wisata dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama yang memicu peningkatan volume sampah. Analisis pemangku kepentingan mengidentifikasi berbagai kelompok kunci, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, pengelola destinasi wisata, pelaku usaha, serta wisatawan. Temuan ini mengungkap adanya perbedaan kepentingan dan peran dalam pengelolaan sampah, yang mempengaruhi efektivitas upaya pengelolaan limbah. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, diperlukan kolaborasi lintas sektor melalui peningkatan kesadaran lingkungan, pengembangan teknologi pengelolaan sampah, serta penguatan regulasi. Dengan pendekatan yang tepat, pengelolaan sampah di kawasan perdesaan prioritas berbasis pariwisata Sembalun dapat lebih efisien, mendukung kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata Kunci: *pengelolaan sampah, analisis pemangku kepentingan, kawasan perdesaan, pariwisata, Sembalun*

Abstract: *Following the designation of Sembalun as a priority rural tourism area through the Lombok Timur Regent's Decree No. 100.3.3.2/310/PD/2024 on September 5, 2024, and its recognition as a thematic village in the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), the area has experienced a significant increase in tourist arrivals. This surge has led to a sharp rise in waste production, presenting a serious challenge for sustainable waste management. This study aims to evaluate waste management in the Sembalun area using the Stakeholder Analysis approach to understand the roles, interests, and relationships among key stakeholders. The research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing data collection techniques including*

field observations, documentation, interviews, and Focus Group Discussions (FGD). The findings reveal that increased tourism activities and economic growth are the primary drivers of rising waste volumes. Stakeholder analysis identified various key groups, including local government, local communities, tourism operators, business owners, and tourists. The results highlight differences in interests and roles among stakeholders, affecting the effectiveness of waste management efforts. Achieving sustainable waste management requires cross-sector collaboration through enhanced environmental awareness, the development of waste management technologies, and the strengthening of regulations. With the right approach, waste management in the priority rural tourism area of Sembalun can become more efficient, supporting environmental conservation and local community welfare.

Keywords: *Waste management, stakeholder analysis, rural areas, tourism, Sembalun.*

Article History:

Received: 01-06-2025

Revised : 09-07-2025

Accepted: 17-07-2025

Online : 01-09-2025



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Masalah pengelolaan sampah terutama di kawasan pariwisata menjadi tantangan global yang semakin mendesak, karena volume sampah terus meningkat akibat aktivitas pariwisata yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Sampah merupakan hasil dari kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna dan tidak diinginkan atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Purwaningrum, 2018). Sampah pariwisata mengacu pada limbah yang dihasilkan dari area wisata, baik dari pengunjung maupun aktivitas masyarakat sekitar (Aritonang et al., 2024). Jenis sampah yang mendominasi dan memiliki jumlah terbesar di Indonesia yaitu sampah organik (Trishuta et al., 2020). Pemicu utama terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap volume sampah dan keragaman jenis sampah dipengaruhi pola konsumsi yang semakin meningkat di kalangan masyarakat (Prasidya et al., 2022). Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk pencemaran lingkungan, gangguan terhadap kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas pengalaman wisata (Gulo et al., 2022).

Kawasan Sembalun di Kabupaten Lombok Timur merupakan destinasi wisata yang memiliki daya tarik alam yang luar biasa, seperti Gunung Rinjani, panorama pegunungan, dan keunikan budaya lokal. Dengan segala potensi tersebut, Sembalun telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata melalui Keputusan Bupati Lombok Timur. Selain itu, kawasan Sembalun juga telah masuk dalam rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai desa tematik yang menjadi model pembangunan berbasis pariwisata di Indonesia. Penetapan ini menandakan peran strategis Sembalun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis pariwisata di tingkat lokal maupun nasional.

Kawasan perdesaan yang dijadikan prioritas pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, kawasan perdesaan sering kali dihadapkan pada berbagai keterbatasan, termasuk dalam hal infrastruktur dasar, seperti sistem pengelolaan sampah. Kekurangan ini dapat memengaruhi kemampuan kawasan dalam menjaga daya tariknya sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap pengelolaan lingkungan, terutama sampah, menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kawasan perdesaan berbasis pariwisata. Peningkatan aktivitas pariwisata menghasilkan jumlah sampah yang signifikan tidak hanya

mencakup sampah organik dan anorganik, tetapi juga melibatkan jenis sampah elektronik, kemasan plastik, dan limbah berbahaya lainnya (Masrurroh, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, sistem pengangkutan sampah, serta edukasi kepada masyarakat dan wisatawan. Jika dibiarkan masalah ini dapat mengancam daya tarik wisata dan kelestarian lingkungan di kawasan Sembalun.

Kawasan Sembalun, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur dikenal karena keindahan alam dan daya tarik budayanya, Sembalun terus menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, peningkatan aktivitas pariwisata ini membawa tantangan besar, terutama dalam pengelolaan sampah. Infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, yang tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal tetapi juga dapat mengurangi daya tarik kawasan ini di mata wisatawan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya strategis untuk mengelola sampah secara efektif guna mendukung keberlanjutan pariwisata di kawasan Sembalun. Pendekatan *Stakeholders Analysis* digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami peran serta kontribusi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif yang mencakup dimensi ekologi, sosial, dan institusi dalam upaya pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan kawasan wisata. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah secara efisien tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sistem pengelolaan sampah yang terencana mampu meminimalkan limbah, mendaur ulang bahan yang dapat digunakan kembali, dan mencegah pencemaran lingkungan. Keberhasilan pengelolaan sampah di Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata seperti Sembalun sangat bergantung pada keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Stakeholders Analysis* menjadi alat yang efektif untuk memahami peran, kepentingan, dan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, dan lembaga non-pemerintah. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Meskipun berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah telah diterapkan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara perumusan kebijakan, implementasi di lapangan, dan studi ilmiah di kawasan wisata perdesaan seperti kawasan Sembalun. Rendahnya efektivitas program pengelolaan sampah sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman berbasis data tentang kondisi aktual di lapangan. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks pengelolaan sampah masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk menilai efektivitas program yang ada sekaligus mengidentifikasi strategi yang lebih tepat guna.

Stakeholders Analysis merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mencari ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk menangani permasalahan yang ditimbulkan (Joni Safaat Adiansyah, Wiwit Bayu Adi, 2022). Pemetaan *stakeholder* juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak secara langsung apabila terdapat regulasi yang tidak sesuai (Joni Safaat Adiansyah & Harry Irawan Johari, 2024). Dalam konteks pengelolaan sampah, analisis ini menjadi penting untuk mengetahui peran setiap pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, komunitas lokal, dan wisatawan.

Pendekatan *Stakeholders Analysis* menawarkan kerangka kerja untuk mengevaluasi pengelolaan sampah di kawasan wisata. Pendekatan ini menggabungkan analisis dari berbagai perspektif, termasuk dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang dampak aktivitas pengelolaan sampah. Penetapan Sembalun sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata membawa peluang besar untuk pembangunan ekonomi lokal. Namun, hal ini juga menuntut perhatian khusus pada keberlanjutan lingkungan agar kawasan Sembalun dapat terus menjadi destinasi wisata yang menarik dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada, khususnya dalam konteks perubahan kebijakan dan pertumbuhan pariwisata pasca penetapan tersebut.

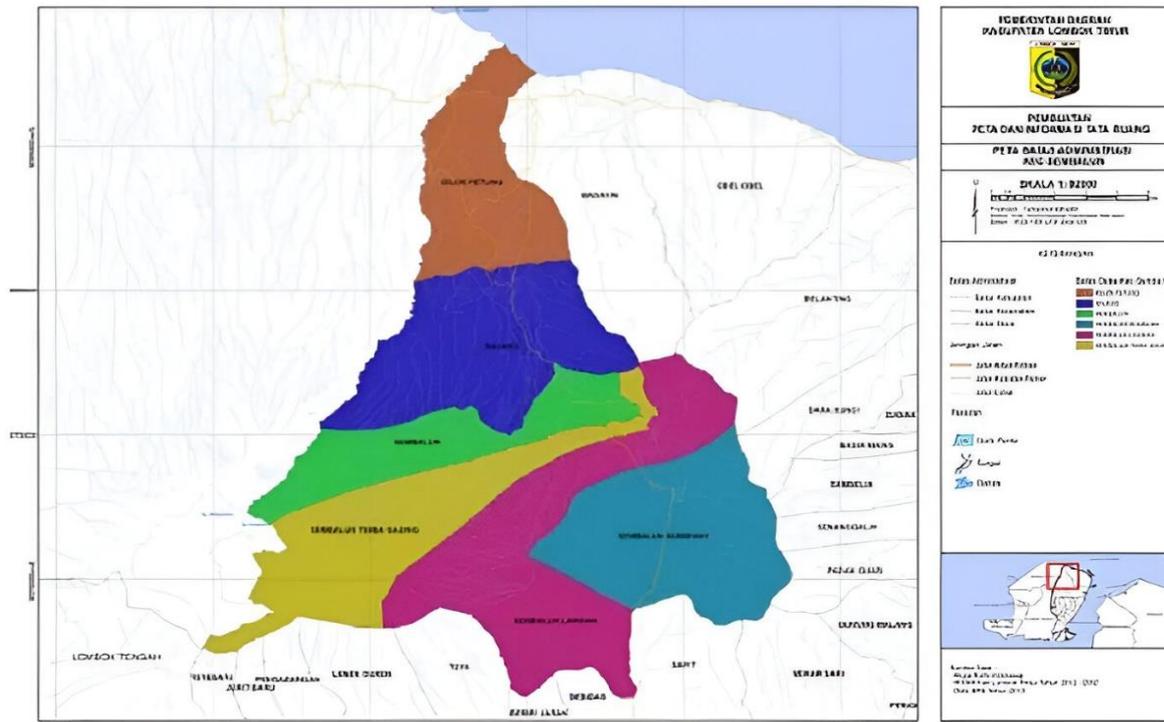
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan *Stakeholders Analysis* pada Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya efektif dalam mengatasi permasalahan sampah tetapi juga relevan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemangku kebijakan dalam mendukung pengembangan kawasan Sembalun sebagai desa tematik unggulan yang sejalan dengan RPJMN 2025–2029.

B. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi pengelolaan sampah di Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan pendekatan *Stakeholder Analysis*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami peran, kepentingan, serta hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kawasan ini. Menurut (Syahrizal & Jailani, 2023), metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terkait suatu fenomena pada waktu tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, termasuk observasi, dokumentasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Observasi dan dokumentasi bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sampah di kawasan Sembalun, sementara wawancara dilakukan dengan pemerintah desa dan wisatawan yang sering berkunjung untuk menggali pandangan mereka tentang masalah sampah di kawasan tersebut. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi bersama pemangku kepentingan, seperti Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dan pemerintah desa, untuk menyusun strategi pengelolaan sampah yang tepat dan berkelanjutan.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang secara administratif terdiri dari 6 desa yaitu Desa Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Lawang, Desa Sajang, Desa Bilok Petung, Desa Sembalun, dan Desa Sembalun Timba Gading, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku untuk kawasan Sembalun dan tidak mewakili kondisi pengelolaan sampah di daerah lain. Penelitian ini menggunakan metode *Stakeholder Analysis* untuk mengidentifikasi peran, kepentingan, serta hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah, seperti pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha (Masrurun & Nastiti, 2023).



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara. FGD melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, serta stakeholder terkait, untuk menggali tantangan dan solusi dalam pengelolaan sampah di kawasan Sembalun (Sukuryadi et al., 2024). Wawancara dilakukan terhadap responden terpilih yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pengelolaan sampah di kawasan ini, dengan tujuan memperoleh pandangan, pengalaman, serta saran konstruktif dalam mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD DUKCAPIL) Provinsi NTB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur, serta pemerintahan desa di Kecamatan Sembalun. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

Instrumen penelitian meliputi wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, pejabat pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal, yang bertujuan untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sampah. Selain itu, observasi dilakukan melalui monitoring langsung di lapangan untuk mencatat kondisi fisik kawasan, sistem pengelolaan sampah, serta perilaku masyarakat dan wisatawan. Dokumentasi juga dilakukan untuk mencatat informasi visual atau rekaman yang mendukung data lapangan terkait pengelolaan sampah di kawasan Sembalun. Keterlibatan stakeholders dalam pengelolaan sampah di kawasan Sembalun sangat bergantung pada kemampuan untuk berkolaborasi secara horizontal (antar instansi pemerintah) dan vertikal (antara pemerintah dan masyarakat). Keterlibatan para stakeholders tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu jaringan interaksi dan kolaborasi lintas sektoral. Kolaborasi ini menjadi krusial karena pengelolaan sampah di kawasan perdesaan berbasis pariwisata tidak hanya menyangkut aspek

teknis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Kolaborasi ini penting untuk menjembatani pendekatan birokratis dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

A. Pengelolaan sampah di kawasan Sembalun sebelum penetapannya sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata

Pengelolaan sampah di Kecamatan Sembalun masih didominasi oleh pendekatan konvensional dan belum terorganisir dengan baik, yang terlihat dari masih banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi. Timbulan sampah di kawasan ini bukan hanya berasal dari rumah tangga (sampah domestik) tetapi juga dari aktivitas pariwisata (sampah non-domestik). Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah, sehingga lingkungan sering terlihat kumuh dan penuh sampah. Upaya pengelolaan sampah yang ada saat ini meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), namun penerapannya belum optimal. Sementara itu, penanganan sampah mencakup pemilahan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara (TPS). Dalam praktiknya, banyak sampah yang hanya ditumpuk lalu dibakar saat musim kemarau, atau dibuang ke sungai dan pinggir jalan.

Sampah dari kawasan Sembalun saat ini dibuang ke TPA Ijobalit di Kecamatan Labuhan Haji, yang berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan untuk mengelola sampah, seperti sosialisasi, pelatihan, dan penerbitan peraturan, hasilnya masih terbatas. Beberapa peraturan dan inisiatif yang telah diterapkan sebelum Sembalun ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah sejak proses produksi hingga penggunaan produk berakhir.
2. SembaluNina, komunitas perempuan di Sembalun yang fokus pada isu-isu lokal seperti sampah, pendidikan, dan air, dengan berbagai program seperti Perbincang (Perempuan Berbincang), Sakolah (Sahabat Sekolah), dan Sembalun Daur yang mempromosikan pengelolaan sampah berbasis gender.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 2 Tahun 2021 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik, yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai.
4. *Destination Management Organization* (DMO) Sembalun, yang bertugas memastikan kelestarian lingkungan dan dampak ekonomi positif dari pariwisata.
5. Program *Zero Waste*, yang menargetkan pengelolaan sampah 100% pada akhir 2023, termasuk program Sedekah Sampah untuk mengurangi beban TPA.
6. Program Olah Sampah Tuntas (OSAMTU) di Desa Sembalun Bumbung dan Desa Sembalun Timba Gading, yang dibangun dengan dana desa pada 2020-2022.
7. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan keamanan kawasan wisata.

8. Karang Taruna, yang berkontribusi dalam pelestarian budaya dan lingkungan serta memastikan pemuda terlibat dalam pengambilan keputusan desa.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa di Kecamatan Sembalun tentang pelestarian sumber mata air, yang bertujuan melindungi sumber air dari pencemaran.
10. Peraturan Bupati Lombok Timur No. 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata Sembalun, yang mengatur tata kelola pariwisata secara efektif.
11. Peraturan Kades Bersama tentang Sembalun Daur, yang mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat yang terlibat.
12. Rinjani *Zero Waste Trekking*, sebuah deklarasi pada 3 September 2024 untuk mewujudkan pendakian bebas sampah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

B. Pengelolaan sampah di kawasan Sembalun pasca penetapannya sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata

Kecamatan Sembalun merupakan satu kesatuan ekosistem sosial dan lingkungan yang utuh. Keberlanjutan pembangunan di berbagai bidang, khususnya pariwisata, sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Sebagai destinasi wisata ramah lingkungan, Sembalun mengandalkan keindahan alam dan budaya sebagai daya tarik utama, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik agar dapat menjadi solusi sosial dan lingkungan (*social and environmental fix*) bagi kawasan ini. Pendekatan pembangunan kawasan perdesaan menekankan pentingnya keterkaitan antar desa dalam satu wilayah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Paradigma pembangunan desa saat ini bukanlah mengubah desa menjadi kota, melainkan mengembangkan desa sesuai karakteristik khasnya. Dalam konteks pariwisata, hal ini berkaitan erat dengan usaha mempertahankan keunikan (*unique selling point*) kawasan sebagai pembeda dengan destinasi lain.

Kecamatan Sembalun ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata melalui Keputusan Bupati Lombok Timur No.100.3.3.2/310/PD/2024 tanggal 5 September 2024, dan juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029 sebagai desa tematik. Penetapan ini menjadi momentum penting untuk merancang pengelolaan kawasan secara menyeluruh dan terpadu. Selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, hal ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), serta monitoring dan evaluasi, ditemukan bahwa pengelolaan sampah di Sembalun masih terkendala oleh aspek infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang belum terintegrasi dengan sistem pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Beberapa peraturan dan program yang diterapkan setelah penetapan Sembalun sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata antara lain:

1. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/310/PD/2024 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan percepatan pengembangan infrastruktur, dengan menghubungkan kota dan desa.

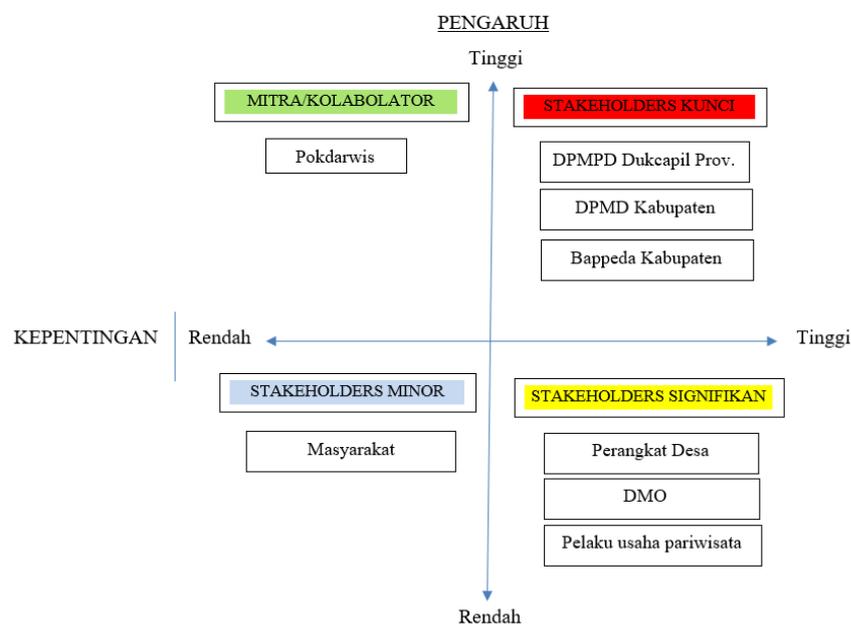
2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/311/PD/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun, yang bertugas mengoordinasikan penetapan kawasan, penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), serta memfasilitasi desa dalam pembangunan kawasan.
3. Konsep pendakian nol sampah yang mulai diterapkan pada April 2025 setelah penutupan pendakian Januari-April untuk pemulihan lingkungan. Kuota pendaki dibatasi 400 orang per hari untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di jalur pendakian yang beragam.
4. Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang merupakan bagian dari pengelolaan kawasan dalam RPJMN 2024-2029, difasilitasi pada April 2025 di Lembah Rinjani Hotel dan Resto. BKAD memperkuat tata kelola kolaboratif antar desa dengan dasar hukum Permendagri No. 96 Tahun 2017 dan Permendes No. 5 Tahun 2016. Diskusi melibatkan 6 desa, DMO, dan Pokdarwis, menghasilkan lima isu utama: Air, Sampah, Pariwisata, Pertanian, dan Tata Ruang. Pengurus BKAD dibentuk secara musyawarah dengan lima divisi utama, dan selanjutnya akan dibuat Draft Permakades serta Surat Keputusan pengurus.
5. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) oleh LPEW FEB Unram selama Maret-Juni 2025, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga desa untuk menghasilkan dokumen perencanaan lima tahunan yang komprehensif dan terukur. Permasalahan pelayanan dasar, lingkungan, dan infrastruktur menjadi fokus dalam rencana aksi dan anggaran untuk mewujudkan kawasan perdesaan berkelanjutan dengan dampak positif pada ekonomi masyarakat.
6. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Sajang yang telah melewati tahap pembebasan lahan, meski sempat mengalami penolakan masyarakat akibat kurangnya informasi tentang dampak sampah. Dalam forum fasilitasi pembentukan BKAD, disepakati TPST akan dibangun di lokasi tersebut.

C. Evaluasi pengelolaan sampah dengan pendekatan Stakeholder Analysis

Proses perencanaan kolaboratif di Kecamatan Sembalun dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat desa. Penyusunan regulasi dan perencanaan pengelolaan sampah di kawasan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam program pariwisata untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan program yang berlangsung (Nurhidayah & Widiyanto, 2024). Pihak yang secara langsung berperan dalam pembuatan regulasi adalah DPMPD Dukcapil NTB, DPMPD Kabupaten Lombok Timur, dan Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan kolaboratif ini mencakup diskusi dengan instansi pemerintah daerah (PMD), kunjungan lapangan ke desa-desa di kecamatan, serta penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai wadah dialog interaktif. Setiap tahap memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan bersama-sama mencari solusi yang relevan serta sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal. Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor utama yang harus dioptimalkan dalam pengelolaan sampah di Kawasan Sembalun. Koordinasi yang baik antar SKPD yang memahami tugas

dan fungsi masing-masing akan memudahkan pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan tersebut. Peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun mencerminkan keterkaitan erat antara tata kelola lingkungan dan pemerintahan daerah. Melalui sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Setelah Sembalun ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata, pengembangan kawasan ini memerlukan manajemen pemangku kepentingan yang kuat untuk mengidentifikasi pengaruh dan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Pemetaan *stakeholder* dalam pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Pemetaan stakeholder dalam pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun

Berdasarkan pemetaan stakeholder yang telah dilakukan dan berdasarkan peran serta pengaruh yang dimiliki dalam proses pengelolaan sampah di kawasan Sembalun, Kuadran I (Stakeholders kunci) ditempati oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat., Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur dan Bappeda Bappeda Kabupaten Lombok Timur merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi berdasarkan pada fungsi yang dimiliki yaitu sebagai pembuat kebijakan terkait regulasi tentang pengelolaan sampah di kawasan Sembalun. Kuadran II (Mitra/kolaborator) ditempati oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan stakeholder yang memiliki peran yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang relatif rendah, stakeholder pada kuadran II bertugas sebagai pendukung dalam pengelolaan sampah di kawasan Sembalun. Kuadran III (Stakeholders signifikan) ditempati oleh Perangkat desa, DMO dan Pelaku usaha pariwisata, merupakan stakeholder yang memiliki peran relatif rendah tetapi memiliki pengaruh yang relatif tinggi karena bertugas mengelola langsung lokasi tersebut. Kuadran IV (Stakeholders minor) ditempati oleh

masyarakat yang merupakan stakeholder yang memiliki peran serta pengaruh yang rendah.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil Monitoring Evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Timur telah menginisiasi pertemuan 6 Kepala Desa yang ada di kawasan Sembalun yaitu Kepala Desa Sembalun Bumbung, Kepala Desa Sembalun Lawang, Kepala Desa Sembalun Timba Gading, Kepala Desa Sembalun, Kepala Desa Sajang dan Kepala Desa Bilok Petung yang tertuang dalam Peraturan Kepala Desa Bersama (PERKADESMA) Tentang "SEMBALUN DAUR" Sistem Tata Kelola Sampah Destinasi Pariwisata Sembalun dan PERKADESMA Tentang Pelestarian Sumber Mata Air Serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih. Hal ini penting karena sumber mata air yang terdapat di wilayah 4 (empat) desa yaitu Desa Sembalun Lawang, Desa Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun, dan Desa Sajang, harus dijaga kelestariannya dari kerusakan, pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas pariwisata, serta interaksi masyarakat dengan kawasan konservasi seperti Gunung Rinjani, timbulan sampah di kawasan Sembalun menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data primer tahun 2025, total timbulan sampah harian di kawasan Sembalun tercatat sebesar 20.983 kg/hari. Angka ini merupakan akumulasi dari tiga komponen utama, yaitu timbulan sampah domestik dari enam desa (Bilok Petung, Sajang, Sembalun, Sembalun Timba Gading, Sembalun Lawang, dan Sembalun Bumbung) sebesar 9.673 kg/hari, sampah dari aktivitas pendakian Gunung Rinjani sebesar 2.714 kg/hari, serta timbulan sampah akibat kunjungan wisatawan sebesar 8.596 kg/hari, jika dibandingkan dengan penduduk kawasan Sembalun saat ini yang berjumlah 24.190 ribu jiwa maka timbulan sampah yang dihasilkan adalah 0,4 kilogram per hari per orang.

Untuk memperkirakan timbulan sampah pada 10 tahun mendatang, digunakan pendekatan proyeksi dengan asumsi pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,2% per tahun, pertumbuhan timbulan sampah dari aktivitas Gunung Rinjani sebesar 2% per tahun, dan peningkatan timbulan dari wisatawan sebesar 5% per tahun. Laju timbulan sampah domestik diasumsikan tetap, yaitu rata-rata 0,4 kg/orang/hari. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2034, total timbulan sampah harian di kawasan Sembalun diperkirakan mencapai 27.349 kg/hari. Rinciannya meliputi timbulan domestik sebesar 10.773 kg, sampah dari aktivitas pendakian sebesar 3.241 kg, dan timbulan wisatawan sebesar 13.335 kg, dengan demikian terdapat peningkatan total timbulan sampah sekitar 30,33% dibandingkan dengan tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan tekanan lingkungan yang semakin besar terhadap sistem pengelolaan sampah di kawasan Sembalun. Oleh karena itu, hasil proyeksi ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan operasional, tetapi juga melibatkan pendekatan partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan di kawasan Sembalun.

Agar pengelolaan sampah di Sembalun lebih berkelanjutan, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Berdasarkan evaluasi, sebaran sampah di kawasan Sembalun disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu kunjungan wisatawan yang mencapai 41% pada hari biasa dan 54% pada hari libur. Sebaran sampah tersebut mayoritas berasal dari aktivitas pariwisata, rumah tangga, serta usaha kuliner dan perhotelan yang didominasi sampah plastik dari botol minuman plastik maupun bungkus makanan, puntung rokok, sedotan, styrofoam, kantong plastik, tisu, kardus dan bungkus mainan. Mengatasi hal tersebut perlu dibangun TPS atau TPST.
2. Melibatkan pelaku wisata dalam upaya pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah. Pelaku wisata yang dimaksud adalah pemerintah setempat, pengusaha pariwisata (penginapan, rumah makan, kedai kopi), dan wisatawan. Pemerintah berperan penting untuk menetapkan regulasi mengenai pengelolaan sampah khususnya di sektor pariwisata. Pengusaha pariwisata bisa mengurangi sampah dengan menyediakan komposter dan fasilitas lainnya yang bisa ditaruh di bagian belakang agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dari aroma sampah yang dihasilkan. Wisatawan memiliki peran kunci dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata, yaitu dengan menghindari penggunaan produk sekali pakai, melakukan upaya pemilahan sampah selama berwisata.
2. Edukasi dan Kampanye Lingkungan: Meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
3. Kolaborasi Multi-Pihak: Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
4. Penguatan Regulasi: Menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong sistem insentif bagi usaha yang menerapkan pengelolaan sampah berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan penggunaan media untuk kampanye akan dilakukan sejak awal. Manajemen akan membangun sinergi dengan beragam media dan pengguna media termasuk wisatawan.
6. *Call Center* untuk segala bentuk urusan kehumasan termasuk informasi, keluhan dan pengaduan. *Call center* akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan jemput sampah khusus, melakukan pengaduan atau keluhan tentang pelayanan dsb
7. Sembalun Daur mengeluarkan sertifikat *Eco-Label* bagi semua mitra sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam upaya perbaikan kondisi lingkungan.

Dalam menganalisa pengelolaan sampah, penting untuk mendefinisikan dengan jelas peran para pemangku kepentingan untuk memastikan kolaborasi yang efektif (Zahrah et al., 2024). Komunikasi serta koordinasi menjadi faktor yang paling penting untuk dimaksimalkan dalam proses pengelolaan sampah di Kawasan Sembalun. (Indah et al., 2021) berpendapat bahwa koordinasi dan komunikasi antar SKPD yang mengetahui tupoksinya masing-masing sangat penting guna mempermudah dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kawasan Sembalun. Manajemen sampah yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, dan pengguna layanan (Dewi, 2017). Dengan penerapan strategi ini, diharapkan pengelolaan sampah di kawasan Sembalun dapat lebih efektif dan mendukung keberlanjutan pariwisata berbasis lingkungan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, pengelolaan sampah di Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun mengalami perubahan signifikan setelah penetapannya. Sebelum penetapan, pengelolaan sampah masih berjalan secara konvensional dan tidak terkoordinasi, dengan pengurangan sampah 3R yang kurang efektif dan praktik pembuangan yang masih sembarangan. Setelah menjadi kawasan prioritas, paradigma pengelolaan bergeser ke arah yang lebih terstruktur dengan penguatan kelembagaan seperti pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan penyusunan Peraturan Kepala Desa Bersama (PERKADESMA) untuk tata kelola sampah dan air bersih. Analisis *stakeholder* mengungkap bahwa peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan pariwisata dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan tekanan pada infrastruktur pengelolaan, yang berdampak pada kualitas lingkungan dan daya tarik wisata. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat, koordinasi aktif antar *stakeholder*, serta kebijakan ketat terkait penggunaan plastik sekali pakai sebagai respons bersama terhadap masalah sampah.

Analisis *stakeholder* menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Sembalun melibatkan berbagai pihak dengan peran dan pengaruh berbeda. Pemangku kepentingan kunci meliputi DPMPD Dukcapil NTB, DPMD Lombok Timur, dan Bappeda sebagai pembuat kebijakan, sementara mitra kolaborator seperti Kelompok Sadar Wisata mendukung pelaksanaan di lapangan. Perangkat desa, DMO, pelaku usaha pariwisata, serta masyarakat juga berkontribusi meski dengan peran dan pengaruh yang bervariasi. Strategi pengelolaan sampah berkelanjutan mencakup pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), keterlibatan aktif pelaku wisata dan masyarakat, edukasi lingkungan, penguatan regulasi, kolaborasi multi-pihak, penyediaan *call center* untuk layanan pengaduan, serta pemberian sertifikat *Eco-Label* oleh Sembalun Daur sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi dalam pelestarian lingkungan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di kawasan Sembalun.

Diperlukan regulasi yang kuat sebagai landasan utama pengelolaan sampah di Sembalun, termasuk pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) sebagai wadah kolaboratif untuk mengatasi masalah bersama antar desa, sehingga menghilangkan ego sektoral dan memperkuat tata kelola kawasan secara terpadu. Keberadaan Peraturan Kepala Desa Bersama (PERKADESMA) terkait sistem tata kelola sampah dan air bersih menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, koordinasi, kolaborasi, dan keterlibatan aktif semua pihak pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat sangat penting untuk efektivitas pengelolaan sampah. Infrastruktur memadai seperti pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS/TPST) harus segera direalisasikan agar masalah sampah dapat diatasi secara nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat Sembalun. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengelolaan sampah berkelanjutan di kawasan wisata Sembalun.

DAFTAR RUJUKAN

- Aritonang, J. I., Darwis, R. S., & Santoso, M. B. (2024). Pengelolaan Sampah Berbasis Stakeholders Di Daerah Pariwisata. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(1), 13–22. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.55410>
- Dewi, R. P. (2017). Perancangan Sistem Pengelolaan Sampah Untuk Mendukung Perkembangan Industri Kreatif Di Daerah Pariwisata. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Papers Unisbank Ke-3*, 3(Sendi_U 3), 217–221.
- Gulo, C. E., Dia, R., Kesuma, I., Kajian, H., Pelayanan, S., Di, P., Medan, K., Studi, (, Kecamatan, K., Kota, M., Dian, R., Indra, D., Hadi, K., Teknik, M. J., Wilayah, P., Jurusan, D., Fakultas, K., Sipil, T., & Perencanaan, D. (2022). 6758 Jurnal Ruang Luar dan Dalam FTSP | 110 KAJIAN SISTEM PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN KOTA). *Jurnal Ruang Luar Dan Dalam FTSP*, 04(8), 3.
- Indah, P., Ayunisa, A. N., & Ayu, D. S. (2021). Co-Management Dalam Penelolan Sampah Di Tpst Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Suluh Abdi*, 3(2), 66. <https://doi.org/10.32502/sa.v3i2.3970>
- Joni Safaat Adiansyah, Wiwit Bayu Adi, A. M. (2022). DAMPAK PERKEMBANGAN SENTRA INDUSTRI TAHU TEMPE DI KELURAHAN ABIAN TUBUH BARU TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 14(1), 90–97.
- Joni Safaat Adiansyah, A. M., & Harry Irawan Johari. (2024). PEMETAAN PERAN SERTA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN RTH PUBLIK DI KOTA MATARAM DENGAN PENDEKATAN STAKEHOLDER ANALYSIS. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Geography](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Geography), 12(1), 424–432.
- Masrurroh. (2021). Bank Sampah Solusi Mengurangi Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(2), 48–69.
- Masrurun, Z. Z., & Nastiti, D. M. (2023). WONOSOBO Stakeholders Analysis in the Development of A Strategic Tourism Area in Wonosobo Regency. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 99–118.
- Nurhidayah, K., & Widiyanto, H. W. (2024). Analisis Stakeholder Pentahelix Dalam Pengembangan Wisata Puncak Sosok Di Desa Bawuran, Pleret, Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 9(1).
- Prasidya, D. A., Novembrianto, R., Munawar, Jawwad, M. A. S., & Rhomadhoni, M. N. (2022). Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 14(2), 169–175.
- Purwaningrum, P. (2018). UPAYA MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH PLASTIK DI LINGKUNGAN. *INDONESIAN JOURNAL OF URBAN AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY*. *The Journal of Immunology*. <https://doi.org/10.4049/jimmunol.159.10.5053>
- Sukuryadi, Anshari, L. M. R., Gunadi, P. E., Johari, H. I., Ibrahim, Adiansyah, J. S., Nurhayati, Mas'ad, Sabri, M., & Palahuddin. (2024). Pendekatan pengelolaan sampah TPA Regional Kebong Kongok. *SELAPARANG: Jurnal ...*, 7(4), 3002–3011. <http://112.78.38.8/index.php/jpmb/article/view/21004%0Ahttp://112.78.38.8/index.php/jpmb/article/download/21004/8439>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Trishuta, P. M., Nur Izzy, S., & Nealma, S. (2020). Science and Technology STUDI LAJU UMPAN PADA PROSES BIOKONVERSI DENGAN VARIASI JENIS SAMPAH YANG DIKELOLA PT. BIOMAGG SINERGI INTERNASIONAL MENGGUNAKAN LARVA BLACK SOLDIER FLY (*Hermetia Illucens*). *Jurnal Tabora*, 4(1), 86–95. <http://jurnal.uts.ac.id>
- Zahrah, Y., Yu, J., & Liu, X. (2024). How Indonesia's Cities Are Grappling with Plastic Waste: An Integrated Approach towards Sustainable Plastic Waste Management. *Sustainability (Switzerland)*, 16(10). <https://doi.org/10.3390/su16103921>